

ANALISIS STRATEGI *LOCKDOWN* ATAU PEMBATASAN SOSIAL DALAM MENGHAMBAT PENYEBARAN *COVID-19*

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹, Timothy Wisnu Harya P. S²,
Emma Tampubolon³, Muhammad Fakhriansyah⁴

^{1,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

^{2,4}Program Studi Magister Arsitektur, Program Pasca Sarjana,
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

posmahutasoit@gmail.com¹, timothywisnu@rocketmail.com², emma.tampubolon@uki.ac.id³,
mfakhriansyahst@gmail.com⁴

Abstract

At the end of 2019, a shocking event occurred for the entire world population, namely the spread of the new corona pneumonia virus (COVID-19) very quickly throughout the world. In some countries affected by COVID-19, such as China, Britain, Italy, Spain, France, Malaysia, and the Philippines have implemented a comprehensive lockdown status. This study wants to analyze the lockdown strategy or not, based on a change management strategy by the leader, using economic theory thinking developed, so that the analysis carried out by policymakers is more fundamental. This research is still very early because the new outbreak occurred at the end of 2019, so the methodology used is a qualitative method. The debate over the policy dichotomy between lockdown (strong restrictions on movement and human activity) or not lockdown (weak restrictions) is very misleading if not carefully planned. This lockdown policy is only an "intermediate" policy in preventing the COVID-19 virus from spreading further. The best strategy for Indonesia is to impose gradual, indirectly substantial restrictions.

Keywords: corona, COVID-19, policy, lockdown

Abstrak

Diakhir tahun 2019 terjadi kejadian yang mengejutkan seluruh penduduk dunia, yaitu menyebarnya virus baru *pneumonia corona (COVID-19)* dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Di beberapa negara yang terdampak *COVID-19*, seperti China, Inggris, Italia, Spanyol, Prancis, Malaysia dan Filipina telah menerapkan status *lockdown* secara menyeluruh. Studi ini ingin menganalisa strategi *lockdown* atau tidak, berdasarkan strategi manajemen perubahan yang dilakukan oleh pemimpin yang memiliki otoritas penuh, dengan menggunakan pemikiran teori ekonomi yang dikembangkan, agar analisa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan lebih mendasar dan fundamental. Penelitian ini masih sangat awal, karena wabah baru terjadi di akhir 2019 sehingga metodologi yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Perdebatan terhadap kebijakan dikotomi antara *lockdown* (pembatasan secara kuat terhadap pergerakan dan kegiatan manusia) atau tidak *lockdown* (pembatasan lemah) sangatlah menyesatkan jika tidak direncanakan secara hati-hati. Kebijakan *lockdown* ini hanya merupakan kebijakan "antara" dalam mencegah virus *COVID-19* lebih meluas penyebarannya. Strategi terbaik bagi Indonesia adalah dengan melakukan pembatasan secara bertahap, tidak langsung kuat.

Kata kunci: corona, COVID-19, kebijakan, *Lockdown*

Corresponding author : posmahutasoit2@gmail.com

History of article: Received: Desember 2019, Revised: Februari 2020, Published: April 2020

PENDAHULUAN

Virus baru *pneumonia corona (COVID-19)* telah menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia sejak akhir 2019. Pertama kali kemunculan virus ini dilaporkan dari Wuhan, China. Kasus terkonfirmasi *COVID-19* telah meningkat cepat hingga jumlahnya jauh melebihi virus *SARS* pada tahun 2003. Karena kemampuan penularan virus ini dari manusia ke manusia, organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization, WHO*) menetapkan keadaan darurat kesehatan publik tingkat internasional pada tanggal 31 Januari 2020. Di beberapa negara yang terdampak *COVID-19*, seperti Tiongkok, Inggris, Italia, Spanyol, Prancis, Irlandia, El Salvador, Belgia, Malaysia dan Filipina telah menerapkan status *lockdown* secara menyeluruh.

Di Indonesia awal terkonfirmasi kasus positif *COVID-19* adalah pada tanggal 2 Maret 2020 berjumlah dua orang yang memiliki riwayat bersentuhan langsung dengan orang Jepang yang teridentifikasi positif corona. Sejak 30 Desember 2019 sampai 8 April 2020, terdapat 16.511 orang yang diperiksa dengan hasil 13.555 orang negatif dan 2.956 kasus konfirmasi positif *COVID-19*, 222 pasien sembuh dan 240 meninggal, seperti dapat dilihat pada tabel 1 (Kemenkes, 2020).

Melihat kasus pasien yang terjangkit *COVID-19* meningkat setiap hari, dimana persebaran virus semakin meluas ke lebih dari 213 negara di dunia yang terkena pandemic (Gugus Tugas, 2020), ada pertimbangan apakah Indonesia perlu melakukan *lockdown*. Berdasarkan data per tanggal 9 April 2020, terkonfirmasi 1.436.198 kasus dengan 85.522 kematian.

Definisi *lockdown*, yang dikutip dari *Cambridge*, dapat diartikan sebagai sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah kawasan secara bebas karena sedang dalam kondisi darurat. Pemerintah sudah berupaya dengan maksimal mengurangi penyebaran virus. Namun jika akan menerapkan *lockdown*, pemerintah harus melakukan kajian secara baik agar segalanya berjalan dengan optimal.

Banyak aspek yang harus diukur dan dianalisa secara berhati-hati. (Tribunnews, 2020)

Read et,all (2020) melakukan penelitian dengan hasil bahwa selama *Lockdown* di Wuhan China, 99% perjalanan ke dan dari Wuhan menurun tajam. Kebijakan ini, walaupun tak dapat menahan laju penyebaran virus ke negara lain, namun mampu menahan laju penyebaran virus sebanyak 24.9%.

Akan tetapi, WHO (2020) menyatakan terdapat dampak *lockdown* terhadap terganggunya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, keberlangsungan bisnis, serta pertumbuhan ekonomi. Namun untuk kondisi dalam mencegah penyebaran virus *COVID-19* tidak menyebar secara lebih luas, *lockdown* dapat berguna, serta sebagai langkah dalam mempersiapkan kesiapsiagaan sarana kesehatan yang lebih baik dan lebih banyak.

Edhie (2020) berpendapat, beberapa hal perlu diperhatikan jika memutuskan untuk melakukan *lockdown* atau mengunci/isolasi wilayah, adalah bahwa sebelum melakukan *lockdown* harus dipastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Seandainya *lockdown* akan diberlakukan dua minggu, maka harus dipastikan kebutuhan dasar masyarakat selama periode tersebut tersedia tanpa ada kelangkaan di pasar.

Abdullah (2020) menyatakan beberapa negara sudah melakukan *lockdown* dalam menekan penyebaran virus *COVID-19*. Saat ini langkah tersebut belum menjadi opsi pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Jika diberlakukan *lockdown* total di Indonesia, dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain, karena jumlah tenaga kerja Indonesia lebih banyak di sektor informal. Sebagian besar ekonomi masyarakat kecil menggantungkan hidup dari penghasilan sehari-hari. Mereka akan kehilangan penghasilan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan primernya. Pemerintah harus memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat menengah ke

bawah yang mendapatkan imbas dari kondisi ini, agar selama masa *lockdown* kebutuhannya terpenuhi. Dampaknya sangat besar terhadap ekonomi dan belum bisa diprediksi, karena belum jelas masa *lockdown* akan diberlakukan mengingat belum ditemukan obatnya sampai saat ini, dan tingkat penyebarannya sangat tinggi.

Kamdani (2020) mengatakan wabah virus *COVID-19* telah menyebabkan *demand shock* dan *supply shock* bagi sektor manufaktur nasional. Sulitnya serapan bahan baku manufaktur lokal akan terlihat pada neraca perdagangan nasional kuartal I/2020. Pemerintah disarankan memberikan insentif dalam bentuk pinjaman perbankan, karena banyak pabrikan sedang bergulat dengan permasalahan arus kas saat ini. Khususnya pelaku industri kecil dan menengah.

Usulan melakukan *lockdown* di wilayah Jakarta menjadi perdebatan di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia. Namun jika diperhitungkan, dampak melakukan *lockdown* di Jakarta cukup besar bagi perekonomian nasional. Yudhistira (2021)¹ memprediksi Indonesia dapat terkena krisis ekonomi apabila Jakarta diisolasi. Sekitar 70% pergerakan uang dalam perekonomian nasional berada di Jakarta, sehingga dapat memberikan risiko jika aktivitas perekonomian di Jakarta lumpuh akibat melakukan *lockdown* di kota Jakarta. Sementara itu Jakarta menyumbang 20% angka inflasi nasional. Jika terjadi barang langka di Jakarta dan berujung pada kenaikan harga secara lokal, maka angka inflasi nasional bisa saja naik hingga di atas 4%-6%. China sebagai negara episentrum wabah corona memang melakukan *lockdown*, namun tidak dilakukan pada kota Shanghai dan Beijing yang merupakan pusat bisnis.

Melihat pada dampak yang akan ditimbulkan jika melakukan *lockdown* dan besarnya anggaran yang akan diperlukan, terjadi perdebatan antara banyak pihak baik antar pemerintah pusat atau daerah, maupun diantara para ahli. Studi ini ingin

mengembalikan analisa pemilihan strategi *lockdown* atau tidak, berdasarkan strategi manajemen perubahan menggunakan teori ekonomi yang dikembangkan, agar analisa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan akan lebih mendasar dan fundamental.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi Manajemen Perubahan

Jauch dan Glueck (1988) mendefinisikan bahwa strategi adalah “satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapi, semuanya menjamin agar tujuan perusahaan tercapai”. Porter (2004) mengatakan strategi merupakan suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan dimasa mendatang. Dalam mencapai tujuan kadangkala terjadi perubahan dalam lingkungan, bahkan sangat ekstrim. Dalam menghadapi perubahan ini perlu dilakukan strategi manajemen perubahan. Menurut David (2004) strategi dapat dibedakan menjadi strategi integrasi, diversifikasi, defensif, dan strategi umum.

Definisi perubahan, menurut Wibowo (2008), adalah membuat sesuatu menjadi berbeda, merupakan pergeseran dari keadaan sekarang menuju pada keadaan yang diinginkan dimasa depan. Berbagai faktor yang menyebabkan perubahan dapat berdasar dari internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri akan adanya kebutuhan perubahan yang dirasakan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar lembaga yang dapat mempengaruhi organisasi atau kegiatan organisasi, seperti ekonomi, politik, hukum, teknologi, kebudayaan, sumber alam, demografi, sosiologi dan sebagainya. Selanjutnya

Wibowo (2008) mengatakan bahwa manajemen perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut.

Manajemen perubahan merupakan suatu proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan juga dipahami sebagai upaya yang ditempuh oleh para manajer untuk mengelola perubahan secara efektif, dimana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, komunikasi dan disiplin. Dengan demikian manajemen perubahan semestinya memiliki strategi yang baik, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang atau akan terjadi. (Arifin, 2017)

Teori kontingensi merupakan salah satu pendekatan manajemen perubahan yang dikembangkan oleh Tannenbaum dan Shmid pada tahun 1973. Teori ini berpendapat bahwa tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam mengelola perubahan. Teori kontingensi juga dikenal orang sebagai teori situasional. Mengingat kompleksitas lingkungan-lingkungan dan organisasi-organisasi. Menurut teori ini, strategi yang dipilih guna menghadapi situasi tertentu, tergantung pada gaya kepemimpinan dan tipe situasi yang dihadapi, atau ia bersifat kontingen pada situasi yang ada. Teori ini lebih cocok digunakan oleh seorang pemimpin atau yang memiliki otoritas dalam suatu organisasi untuk mengelola suatu perubahan, dengan gaya kepemimpinan beragam, mulai dari sangat otoritatif hingga partisipatif. (Arifin, 2017)

Hampir semua perubahan terjadi melalui tahap-tahap, termasuk dalam manajemen perubahan, yaitu: tahap identifikasi perubahan, tahap perencanaan perubahan, tahap implementasi perubahan,

serta tahap evaluasi dan umpan balik. Berbagai strategi manajemen perubahan yang dapat digunakan antara lain adalah *political strategy, economic strategy, academic strategy, engineering strategy, military strategy, confrontation strategy, applied behavioral science, dan followship strategy*. (Arifin, 2017)

Situasi penyebaran virus COVID-19 yang ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, sangat mempengaruhi sikap dan kebijakan negara-negara di dunia termasuk Indonesia dalam melindungi warga negaranya. Situasi kontingensi ini, dimana dunia berubah secara mendadak akibat adanya *shock* dari pandemi ini, sangat berdampak pada ekonomi global, bahkan berpotensi terjadinya krisis ekonomi. Karena itu untuk menghadapinya diperlukan strategi yang diambil oleh pemimpin terhadap langkah-langkah yang lebih agresif, berani dan cepat. Tidak hanya sebatas menahan dan menghentikan sebaran COVID-19 dan menyelamatkan nyawa manusia, tetapi juga harus paralel dengan kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi masyarakat dari kehancuran ekonomi dan kemampuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan negara.

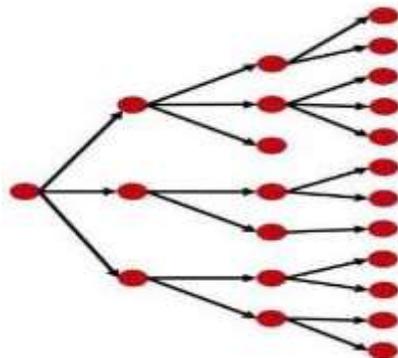
Pemilihan Strategi *Lockdown* (Pembatasan Sosial yang Kuat) dan Tidak *Lockdown* (Pembatasan Sosial Lemah)

Dineros & Dipasupil (2020) memberikan definisi *lockdown* sebagai: “Sebuah protokol darurat yang biasanya digunakan untuk mencegah orang meninggalkan suatu wilayah. Protokol ini biasanya hanya dapat diprakarsai oleh seseorang yang memiliki otoritas. *Lockdown* penuh biasanya berarti bahwa orang tersebut harus tinggal di tempat mereka berada dan tidak boleh masuk atau keluar dari suatu lokasi.”

Indonesia tidak mengenal *lockdown*, namun lebih mengenal istilah karantina wilayah berdasarkan Undang-Undang No.6/2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah No.21/2020, karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah

termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Yang sedang dilakukan di Indonesia adalah *physical distancing* atau sebagian ahli mengatakan semi *lockdown*, atau *lockdown* sebagian, atau *lockdown* yang diperlunak. Implementasi *physical distancing* ini berdasarkan data bahwa 1 orang positif *corona* bisa menularkan penyakit ini pada 2-3 orang baru, dengan jumlah penduduk terinfeksi yang mencapai ribuan orang. Maka jika implemantasi *physical distancing* tidak dilaksanakan secara disiplin, maka akan semakin banyak orang yang tertular dan menjadi *reported case*, seperti dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.(Calvin et.all, 2020)

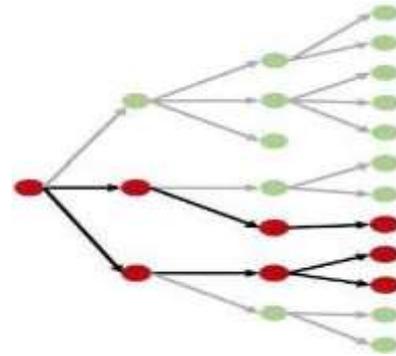


Gambar 1. Diagram Jika Implementasi *Physical Distancing* Tidak Dilakukan

Jika implementasi *physical distancing* tidak dilakukan secara disiplin, interaksi antar manusia berjalan normal, maka dapat dibayangkan akan ada berapa banyak interaksi yang terjadi setiap hari, dan berapa banyak orang baru yang akan terinfeksi setiap hari. Berikut Gambar 2 jika suatu wilayah dilakukan *physical distancing*.

Ketika implementasi *physical distancing* dilakukan secara serius dan disiplin, interaksi antar manusia bisa seminim mungkin sehingga menyelamatkan banyak orang dari terinveksi virus. Karena itu perlu adanya intervensi pemerintah, seperti menutup tempat hiburan dan

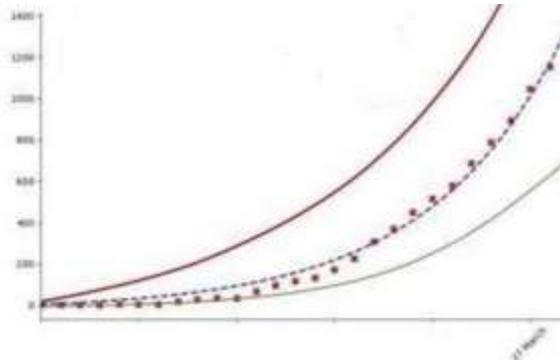
memberlakukan *work from home* untuk mengurangi interaksi antarmanusia. Seandainya tindakan ini tidak diambil sejak dari awal, keadaan mungkin persebaran virus akan menjadi lebih buruk (BNPBB, 2020).



Gambar 2 Diagram Jika Implementasi *Physical Distancing* Dilakukan Secara Disiplin

Ketika implementasi *physical distancing* dilakukan secara serius dan disiplin, interaksi antar manusia bisa seminim mungkin sehingga menyelamatkan banyak orang dari terinveksi virus. Karena itu perlu adanya intervensi pemerintah, seperti menutup tempat hiburan dan memberlakukan *work from home* untuk mengurangi interaksi antarmanusia. Seandainya tindakan ini tidak diambil sejak dari awal, keadaan mungkin persebaran virus akan menjadi lebih buruk (BNPBB, 2020).

Dampak dari intervensi pemerintah terhadap penyebaran *COVID-19* dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini (Calvin et.al, 2020). Kurva paling atas (berwarna merah), akan mungkin terjadi jika tidak ada intervensi pemerintah dalam meminimalisir interaksi antar manusia (akumulasi kasus positif akan lebih tinggi. kurva paling bawah dimungkinkan terjadi jika *physical distancing* dijalankan dengan disiplin, sehingga akumulasi pasien kasus positif akan lebih rendah.



Gambar 3. Diagram Perbandingan Kurva Interaksi Antar Manusia dengan Pembatasan dan Tanpa Pembatasan.

Sumber: Calvin et.all, 2020

METODE PENELITIAN

Banyak negara di dunia saat ini sudah menerapkan atau sedang mempertimbangkan *lockdown* terhadap sebagian besar kegiatan ekonomi negaranya untuk menahan penyebaran pandemi *COVID-19*. Di negara-negara yang telah menerapkannya, perdebatan beralih menjadi kapan dan bagaimana keluar dari *lockdown*, sehingga ekonomi dapat dimulai dan diperbaiki kembali. Sampai saat ini semua masih sangat tergantung dari situasi negaranya masing-masing.

Dalam pembahasan, artikel ini bertujuan untuk mendapatkan strategi terbaik menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dasar dalam melihat *trade-off* yang terkait dengan pengaruh *lockdown* terhadap situasi kesehatan dan perekonomian akibat penyebaran pandemi *COVID-19*.

Penelitian ini masih sangat awal, karena wabah baru terjadi di akhir 2019, sehingga metodologi yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Dokumen-dokumen dikumpulkan, buku-buku, paper termasuk berita-berita dari internet, kemudian diramu dalam sebuah tulisan ilmiah. Sumber dokumen dari studi ini terutama berasal dari tulisan Emanuel

Ornelas (2020) dan Baldwin (2020) tentang *Economics in the Time of COVID-19*.

Dari analisa kualitatif menggunakan teori ekonomi ini, maka dapat ditetapkan strategi terbaik apa yang harus diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi penyebaran virus *COVID-19* yang sangat cepat menyebar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia mengalami wabah virus *COVID-19* yang sangat cepat penyebarannya. Jika tidak dilakukan strategi secara ekstraordinari untuk menahan penyebaran virus, maka dikhawatirkan akan menimbulkan korban manusia yang sangat banyak bersamaan dengan rusaknya perekonomian. Sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif untuk menekan penyebaran virus melalui pemilihan strategi perlunya *lockdown* (pembatasan pergerakan dan kegiatan manusia yang kuat) atau tidak (pembatasan lemah). Pemilihan strategi secara teoritis dalam studi ini didasarkan dari pemikiran Ornelas (2020) sebagai sumber utama.

Analisis Manfaat dan Biaya untuk *Lockdown* Total

Sisi positif dari *lockdown* adalah membawa manfaat kesehatan bagi masyarakat karena memberikan potensi pengurangan penyebaran virus, mengurangi jumlah infeksi, dan memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengobati mereka yang terinfeksi dengan lebih baik. Namun di sisi lain, *lockdown* dapat mengganggu atau merusak perekonomian, karena kegiatan-kegiatan ekonomi dihentikan..

Dalam studi ini secara bebas nilai ingin menjawab pertanyaannya apakah pemerintah harus menerapkan *lockdown* atau tidak. Untuk itu dilakukan *cost benefit analysis*, dengan membandingkan antara manfaat dan biaya. Yang harus diperhatikan dalam analisis ini adalah kejadian akan selalu berubah seiring waktu. Pada puncak epidemi, kebijakan menghentikan interaksi antar manusia memiliki manfaat kesehatan yang sangat besar, sebab dapat menghentikan

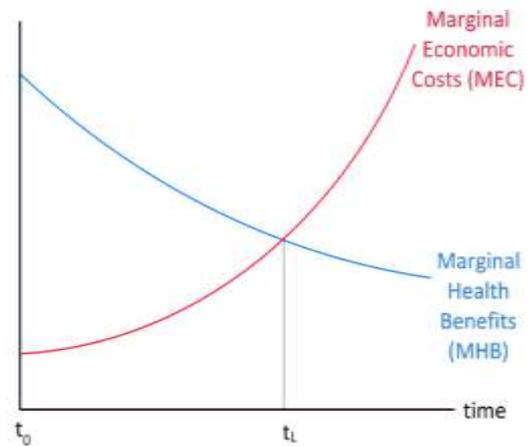
penularan dan mencegah tekanan tambahan kepada tenaga kesehatan karena kelebihan beban. Namun, setelah *lockdown* diberlakukan, untuk sementara waktu, manfaat kesehatan ini turun secara bertahap karena situasi kesehatan menjadi lebih mudah dikelola (Hall & Jones, 2007). Artinya, manfaat kesehatan marjinal (*marginal health benefit, MHB*) dari *lockdown* berkurang seiring berjalannya waktu. Pada saat yang sama, biaya ekonomi ketika *lockdown* justru meningkat seiring waktu.

Oleh Baldwin (2020), dianalogikan bahwa kita sebenarnya terbiasa melakukan *lockdown* parsial selama akhir pekan dan hari libur nasional, tetapi biayanya sangat kecil karena kita tahu hanya dilakukan beberapa hari.

Akan tetapi, untuk mempertahankan *lockdown* dalam periode yang lebih lama, akan membebankan biaya yang meningkat pada masyarakat, karena banyak perusahaan akan bangkrut, pekerja diberhentikan, dan pada akhirnya, tingkat konsumsi dan kesejahteraan turun tajam secara terus menerus. Artinya, biaya ekonomi marjinal (*marginal economic cost, MEC*) dari *lockdown* meningkat seiring waktu.

Gambar 4 di bawah ini menggambarkan hal tersebut. Dalam keadaan normal, jika tidak terjadi endemi, yang terjadi adalah $MHB < MEC$ pada t_0 , sehingga tidak ada keputusan yang membahas diberlakukannya *lockdown* di suatu wilayah. Namun jika situasinya berbeda, yaitu terjadi puncak epidemik di suatu wilayah, dimana negara-negara tidak siap untuk menanganinya, seperti saat sekarang ini karena penyebaran *COVID-19* dengan sangat cepat, yang terjadi adalah $MHB > MEC$ pada t_0 . Sehingga ada keputusan untuk menerapkan *lockdown* (selanjutnya diberi nama variabel L). Keputusan *lockdown* dari periode awal ini akan lebih baik daripada tidak menerapkannya. Akan tetapi, hal ini akan berubah seiring waktu, karena situasi kesehatan menjadi lebih terkendali dan mudah dikelola. Tetapi akibat *lockdown* ini,

situasi ekonomi justru menjadi lebih mahal. Akhirnya (di periode t_L seperti dalam gambar), menjadi lebih baik untuk meninggalkan keputusan *lockdown*



Gambar 4. Durasi Optimal Kebijakan *Lockdown* Penuh

Oleh karena itu, dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan secara sederhana adalah, pada puncak epidemik, diberlakukannya *lockdown* penuh (atau hampir penuh) adalah lebih baik daripada tidak sama sekali, bagi negara-negara yang tidak siap menghadapi epidemik, karena kurang memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan yang cukup. Namun *lockdown* tidak boleh berlangsung lama, dan durasinya harus ditentukan oleh hasil dari manfaat marjinal (kesehatan) dan biaya (ekonomi). Kesimpulan ini sangat sederhana, karena menyajikan masalah sebagai dikotomis: apakah perlu *lockdown* atau tidak. Akan tetapi keputusan ini dapat saja tidak optimal, karena dalam melakukan kebijakan publik akan ada dampak tersendiri.

Tingkat Optimal Keputusan *Lockdown* dari Waktu ke Waktu

Jika kita pertimbangkan kemungkinan untuk dilakukannya kebijakan *lockdown sebagian*, bukan total. Kita memisalkan sebuah variabel l yang berubah dari 0 (dimana tidak ada pembatasan sama sekali untuk semua kegiatan ekonomi), ke L (*lockdown* penuh, dimana orang tidak boleh berinteraksi satu sama lain di luar rumah dan hampir semua kegiatan ekonomi

berhenti). Kemudian analisa kita lakukan dengan tidak mempertimbangkan manfaat dan biaya dari *lockdown* penuh, tetapi melihat perubahannya dari waktu ke waktu. Kita akan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari berbagai tingkat *lockdown* pada titik-titik waktu tertentu (lihat Gambar 7).

Ketika l bergerak mendekati nol, manfaat kesehatan dari peningkatan l adalah yang terbesar, karena itu akan memiliki dampak terbesar terhadap usaha pengurangan penularan disebabkan masih besarnya interaksi antar orang. Namun begitu l menuju sangat dekat dengan L , manfaat kesehatan tambahan dari peningkatan l menjadi lebih kecil, karena sangat sedikit orang yang berinteraksi satu sama lain, dan virus menyebar pada tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu, *MHB* berkurang dengan bergeraknya l menuju L .

Sebaliknya, ketika l sangat dekat dengan nol, biaya ekonomi dengan bergeraknya l adalah semakin kecil, karena tidak akan mengganggu aktivitas utama apa pun. Namun, jika l menuju sangat dekat dengan L (*lockdown* penuh), biaya ekonomi tambahan dari peningkatan l menjadi sangat besar, karena beberapa kegiatan ekonomi penting perlu ditutup. Oleh karena itu, *MEC* akan meningkat seiring dengan adanya pergerakan l menuju L .

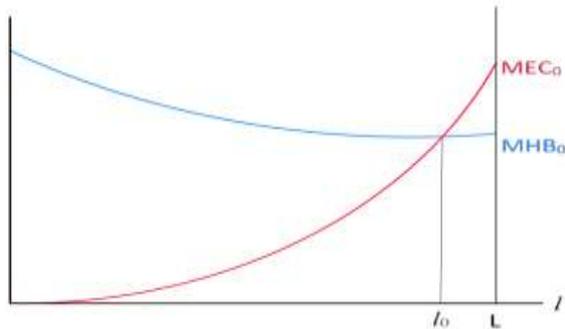
Tersirat dalam diskusi di atas, bagaimana *MHB* dan *MEC* berubah seiring bergeraknya l . Dengan asumsi bahwa terdapat “*urutan optimal*” untuk setiap kebijakan kegiatan, karena l bergerak dari 0 ke L (lihat Gambar 6). Ini kunci pemikiran utamanya, bahwa keputusan *lockdown* progresif, pertama-tama harus melihat aktivitas yang menghasilkan biaya ekonomis paling rendah dan sebagian besar manfaat kesehatan. Jelas untuk merancang perencanaan yang sempurna harus dilakukan secara sangat berhati-hati, terutama karena masyarakat memiliki sedikit pengalaman dalam melakukan hal ini. Namun demikian, relatif lebih mudah dengan menempatkan beberapa kebijakan kegiatan di dekat kedua keputusan ekstrem tersebut ($0 - L$).

Kebijakan yang dapat diambil misalnya, pekerjaan kantor yang dapat dilakukan secara *online* harus menjadi keputusan yang terutama, karena membebaskan biaya ekonomi yang sangat kecil dan menghasilkan beberapa manfaat kesehatan, karena orang menjadi tidak berinteraksi di kantor. Acara olahraga besar juga akan menjadi yang pertama untuk dihentikan atau ditunda, untuk mencegah mereka mendapatkan manfaat kesehatan yang besar (karena harus dirawat akibat tertular), walaupun bahkan jika biaya ekonomi tidak dapat diabaikan. Selain itu, kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam kelompok risiko untuk tertularnya *COVID-19* (seperti orang lanjut usia dan orang-orang yang memiliki penyakit kronis), harus menjadi yang pertama yang perlu dihindari atau diisolasi untuk mencegah penularan. Di sisi titik ekstrim lainnya, sebaliknya, kita harus memiliki kegiatan yang pelarangannya akan menyebabkan biaya ekonomi yang besar dan manfaat kesehatan yang kecil (misalnya pengumpulan sampah, penyediaan berita, toko bahan makanan, dan yang pasti adalah layanan kesehatan, yang akan menyebabkan *MHB* negatif).

Gambar 5 menggambarkan pembahasan ketika berada di puncak krisis epidemi. Pada saat itu, kasus untuk *lockdown* yang hampir penuh adalah lebih baik, sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam analisis dikotomis sebelumnya (*lockdown* penuh atau tidak *lockdown*). Meskipun demikian, *lockdown* penuh tidak akan optimal, karena perlu dijaga layanan penting dan produksi produk-produk penting (seperti makanan, obat-obatan dan lainnya) secara aktif. Namun, l mungkin pada awalnya cukup tinggi, tetapi *l optimal* adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik l_0 .

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan secara sederhana: kegiatan yang akan ditunda harus disusun dari mereka yang menghasilkan manfaat kesehatan yang lebih tinggi dan mengenakan biaya ekonomi yang lebih rendah, sampai pada yang memiliki efek sebaliknya; tingkat *lockdown* yang optimal kemudian, harus menyamakan

manfaat kesehatan marjinal dengan biaya ekonomi marjinal.



Gambar 5. Kebijakan *Lockdown* Optimal yang Cenderung Parah pada Puncak Pandemi.

Solusi yang diberikan akan memberikan dampak selama epidemi akibat penanggulangan beberapa kegiatan ekonomi. Ketika sebuah epidemi sangat serius terjadi dan pemerintah tidak siap untuk menghadapinya, seperti halnya *COVID-19*, maka di periode awal, sejumlah besar kegiatan perlu ditunda atau di-*lockdown*, walaupun akan memberikan pengorbanan dengan menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan.

Sekarang, ketika l_0 tetap di tempat untuk sementara waktu, kurva berubah, seperti yang disarankan oleh Gambar 5. Secara khusus, kurva *MEC* akan bergeser ke atas untuk setiap level l . Pada saat yang sama, karena epidemi lebih terkontrol, kurva *MHB* akan bergeser ke bawah. Namun, pada tahap awal kurva itu bisa naik karena alasan 'eksogen' - yaitu, mengikuti dinamika penularan epidemi atau karena sistem kesehatan runtuh dan secara dramatis membutuhkan pertolongan.

Periode Ketika Tingkat *Lockdown* Diubah Secara Bertahap

Gambar 6 di bawah ini menggambarkan dinamika perubahan keadaan ekonomi. Agar lebih mudah dan jelas, diasumsikan bahwa l_0 sedemikian rupa sehingga hanya mengimbangi kekuatan eksogen (proses penularan epidemi yang cepat) pada awalnya, sehingga grafik *MHB* tetap tidak berubah pada periode berikutnya. Dalam hal ini, karena pergeseran

dalam kurva *MEC*, level baru dari optimal l, l_1 , lebih rendah dari l_0 . Yaitu, karena biaya ekonomi meningkat dari waktu ke waktu, maka pembatasan kegiatan ekonomi harus agak dilonggarkan (katakanlah, beberapa toko pengecer yang mempekerjakan pekerja berpenghasilan rendah mungkin diizinkan untuk membuka kembali).

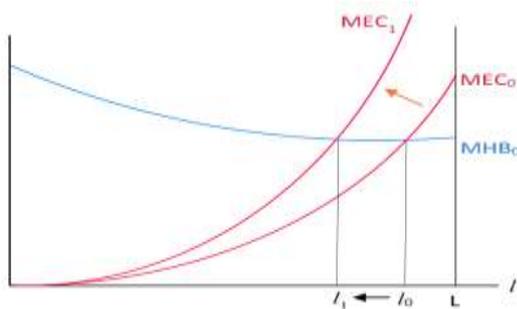
Ini tidak dapat dilakukan jika dinamika eksogen epidemi sedemikian rupa sehingga kurva *MHB* bergerak naik dengan sangat cepat. Kebijakan optimal yang mungkin harus diambil adalah *lockdown* yang lebih ketat di periode 1 daripada di periode 0. Namun, epidemi pada akhirnya seiring waktu akan berjalan dan berakhir, bahkan jika dibiarkan tidak diobati (*herd immunity*). Dengan demikian, kurva *MHB* pada akhirnya akan bergeser ke bawah (Lihat Gambar 6).

Hal ini akan menjadikan situasi semakin parah daripada rencana *lockdown* awal (l_0) jika pembatasan ekonomi dicabut lebih awal (l_1). Semakin cepat dilakukan, semakin cepat kejadian ini akan terjadi. Ini menyiratkan bahwa l optimal pada akhirnya akan jatuh, dengan pembatasan ekonomi dicabut.

Namun demikian, perlu waktu untuk kembali ke nol, sehingga tidak serta merta situasi menjadi parah. Hal ini memperkuat kejadian bahwa solusi tidaklah dikotomis. Penanggulangan beberapa kegiatan ekonomi yang optimal dilakukan bertahap hingga epidemi sepenuhnya terkendali. Dan jalur waktu yang optimal biasanya mulus dan tahan lama, dengan pembatasan dikurangi dari waktu ke waktu.

Hal ini juga memiliki implikasi bagi dinamika epidemi, yaitu bahwa tujuan pembatasan kegiatan ekonomi (dan sosial) bukan untuk menghilangkan epidemi dengan cepat, tetapi untuk menjaga biaya kesehatannya selaras dengan biaya ekonomi dari pembatasan tersebut. Dengan demikian, peningkatan kasus, seperti yang baru-baru ini terjadi di beberapa negara Asia yang tampaknya mengendalikan epidemi, tidaklah dijadikan alasan untuk berpikir bahwa

'sistem mereka tidak berfungsi'. Sebaliknya, itu adalah konsekuensi dari pemantauan epidemi yang optimal, yang seharusnya tidak bertujuan untuk menghilangkannya sekaligus.



Gambar 6. Kebijakan *Lockdown* yang Optimal Menjadi Lebih Toleran dari Waktu ke Waktu

Kesimpulan dari paparan di atas dapat dinyatakan dengan lebih rinci adalah: tingkat optimal *lockdown* berubah dari waktu ke waktu dan akhirnya menurun, tetapi tidak turun ke nol dengan cepat. Alih-alih, perlu pengelolaan pertukaran kesehatan-ekonomi dari waktu ke waktu. Yang menjadi peringatan terhadap kelemahan model ini, adalah masalah posisi yang inheren dinamis, karena posisi dua kurva dalam suatu titik waktu tergantung pada kebijakan periode sebelumnya. Apa yang dilakukan Gambar 5 dan 6, dengan mengilustrasikan berbagai titik waktu, mengikuti dinamika tersebut. Ini memang belumlah lengkap dan akurat, namun sekiranya cukup untuk menekankan pesan kualitatif awal yang akan diberikan oleh model yang benar-benar dinamis.

Kebijakan yang Menjaga Kurva MHB dan MEC Tetap Rendah

Banyak perdebatan saat ini tentang kebijakan kesehatan terbaik untuk menahan penyebaran epidemi dan mencegah keruntuhan sistem kesehatan dalam suatu negara. Termasuk dalam menjaga orang-orang yang rentan tetap terisolasi, pengujian luas dan pemantauan terus dilakukan, isolasi terhadap mereka yang dites positif dan yang melakukan kontak dengan pasien, membangun rumah sakit dan menambah tempat tidur, produksi peralatan medis untuk mengobati orang sakit, dan lain

sebagainya. Meskipun terdapat biaya ekonomi langsung dari tindakan tersebut, menjadi patokan yang diperhatikan selain biaya ekonomi dari *lockdown*.

Langkah-langkah kesehatan untuk menahan penyebaran virus dan mempersiapkan sistem kesehatan yang lebih baik dapat diartikan sebagai kebijakan yang mendorong kurva *MHB* ke bawah. Dengan demikian, jika kurva *MHB* bergeser ke bawah, pada suatu titik akan mengurangi ketatnya dari kebijakan *lockdown* optimal. Dengan demikian, tidak hanya tindakan akan membawa manfaat kesehatan langsung, mereka juga memungkinkan untuk manfaat ekonomi tidak langsung dengan mengizinkan kebijakan *lockdown* yang lebih lunak.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah kesehatan yang lebih baik untuk memerangi epidemi, memungkinkan kebijakan *lockdown* yang lebih lunak, oleh sehingga pengeluaran biaya ekonomi tidak menjadi lebih parah.

Jika Negara Lebih Mengutamakan Kelangsungan Kegiatan Ekonomi

Bagian dari perdebatan saat ini yang bukan berhubungan dengan kebijakan kesehatan adalah, bagaimana kebijakan ekonomi terbaik selama krisis. Menurut Baldwin & Mauro (2020), kita harus tetap "menjaga lampu menyala" sampai epidemi dapat dikendalikan. Seperti kebijakan untuk mempertahankan pekerjaan, menghindari kebangkrutan, memperluas kredit ke perusahaan dan konsumen, dan sebagainya. Biasanya, tujuannya adalah untuk: (1) Mencegah gangguan sistem ekonomi saat ini dalam menjadi permanen, dan (2) Mengurangi turunnya kesejahteraan ke titik yang paling rentan.

Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditafsirkan sebagai langkah-langkah yang menekan kurva biaya *MEC*, sehingga pemerintah membuat kebijakan *lockdown* yang tidak terlalu menyakitkan dalam jangka pendek, dan menurunkan efek buruk jangka panjangnya. Jelas, jika kurva *MEC* bergeser ke bawah, pada suatu titik waktu akan

meningkatkan keparahan kesehatan, daripada dilakukannya *lockdown* optimal. Dengan demikian, kebijakan untuk meringankan biaya ekonomi, justru akan memungkinkan dilakukannya kebijakan *lockdown* yang lebih ketat di kemudian hari untuk membantu mengatasi epidemi yang lebih parah secara lebih cepat dan efektif.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa langkah-langkah untuk meringankan penderitaan ekonomi selama perang melawan epidemi justru akan membuka jalan bagi kebijakan *lockdown* yang lebih ketat untuk mengurangi penyebaran virus yang lebih serius menuju pengeluaran manfaat kesehatan yang lebih kecil.

Pengaruh Karakteristik Negara terhadap Kurva *MHB* dan *MEC*

Kurva *MEC* dan *MHB* sangat bervariasi antar wilayah atau negara, tergantung pada karakteristik sosial ekonominya.

Dimulai dengan kurva *MHB*, tiap negara dapat sangat berbeda tergantung pada sifat budaya dan demografi negara tersebut, bahkan untuk tahap epidemi tertentu. Misalnya, jika generasi-generasi yang berbeda hidup bersama, atau jika memiliki penduduk lansia dengan populasi yang tinggi, maka kurva *MHB* akan relatif tinggi. Misalnya, bandingkan keadaan negara Italia dengan Jerman. Negara dengan proporsi lansia yang tinggi yang cenderung tinggal dengan kerabat yang lebih muda (Italia) akan memerlukan kebijakan *lockdown* yang lebih ketat daripada negara dengan karakteristik yang berlawanan (Jerman).

Analisa yang lebih kritis adalah dengan melihat struktur sistem kesehatan dari suatu negara. Sejauh ini, negara dengan sistem kesehatan yang relatif bagus masih banyak dimiliki negara-negara kaya. Berbeda di negara-negara berkembang, sistemnya masihlah belum terlalu baik. Oleh karena itu, kurva *MHB* cenderung jauh lebih tinggi di negara berkembang daripada di negara kaya. Hal ini dengan sendirinya, akan

mendorong perlunya kebijakan *lockdown* yang lebih ketat.

Akan tetapi, kita harus melihat juga bagaimana tingkat perekonomian suatu negara mempengaruhi kurva *MEC*. Kurva ini akan relatif lebih rendah di negara-negara dimana individu-individunya memiliki akses ke tabungan yang lebih baik, dan pemerintah dapat secara langsung dan tidak langsung (melalui insentif untuk sektor swasta) mampu menjaga pendapatan dan pembayaran mengalir dengan baik, dan mampu membatasi kebangkrutan dan PHK selama puncak krisis. Di sisi lain, di negara-negara dimana hanya sedikit rumah tangganya memiliki tabungan, sektor informal (yang cenderung lebih terpengaruh) adalah besar, dan pemerintah tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk menjaga pendapatan dan pembayaran agar tetap mengalir, maka *MEC* akan jauh lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua kurva (*MHB* dan *MEC*) akan lebih tinggi di negara berkembang.

Akan tetapi dampak kebijakan *lockdown* optimal bersifat ambigu. Hal ini akan tergantung pada seberapa baik atau buruknya sistem kesehatan relatif terhadap sistem ekonomi di suatu negara. Di wilayah-wilayah dimana sistem kesehatan lebih siap untuk mengatasi epidemi daripada sistem ekonomi untuk mengatasi pembatasan kegiatan, disarankan *lockdown* yang lebih lunak. Demikian pula sebaliknya.

Untuk negara-negara berkembang, baik biaya ekonomi dan kesehatan dari epidemi akan jauh lebih tinggi daripada negara-negara kaya. Kurva akan berpotongan pada tingkat yang lebih tinggi, baik karena ekonomi tidak dapat dipertahankan dalam periode *lockdown* dan karena sistem kesehatan tidak cukup dalam menangani epidemi. Kebijakan *lockdown* optimal harus mempertimbangkan kedua biaya tersebut secara optimal, walaupun dapat memberikan dampak yang mengerikan. Drama yang telah terlihat di Eropa dan di Amerika Serikat mungkin dikerdilkan oleh apa yang akan terjadi di

negara-negara miskin yang terkena dampak epidemi.

Jadi, kesimpulan terakhir yang dapat ditarik adalah bahwa pada umumnya masalah ambigu apakah kebijakan *lockdown* optimal harus lebih ketat di negara kaya atau di negara berkembang. Terlihat dari data 10 besar negara dengan jumlah terjangkit virus terbanyak per tanggal 14 April 2020, yaitu (Kompas.com, 2020a):

1. Amerika Serikat, 584.862 kasus, 23.555 orang meninggal, total sembuh 36.205
2. Spanyol, 170.099 kasus, 17.756 orang meninggal, total sembuh 64.727.
3. Italia, 159.516 kasus, 20.465 orang meninggal, total sembuh 35.435.
4. Perancis, 136.779 kasus, 14.967 orang meninggal, total sembuh 27.718.
5. Jerman, 129.207 kasus, 3.118 orang meninggal, total sembuh 64.300.
6. Inggris, 88.621 kasus, 11.329 orang meninggal, total sembuh 344.
7. China, 82.160 kasus, 3.341 orang meninggal, total sembuh 77.663.
8. Iran, 73.303 kasus, 4.585 orang meninggal, total sembuh 45.983.
9. Turki, 61.049 kasus, 1.296 orang meninggal, total sembuh 3.957.
10. Belgia, 30.589 kasus, 30.589 orang meninggal, total sembuh 6.707.

Kebijakan *lockdown* optimal merupakan kebijakan perantara. Untuk negara-negara yang lemah terhadap epidemi saat ini, bentuk *lockdown* ketat yang optimal harus dilakukan ketika epidemi menjangkiti negara tersebut. Setelah itu, kebijakan harus dilakukan menjadi lebih lunak, tetapi harus tetap berlaku selama epidemi menjadi ancaman bagi sistem kesehatan, meskipun dalam bentuk yang semakin ringan. Artinya, mungkin akan memakan waktu beberapa bulan untuk suatu negara kembali ke situasi semula.

Lockdown harus dicabut ketika semua kegiatan yang dilakukan hanya menyebabkan sedikit bahaya. Yang terpenting adalah, tingkat *lockdown*, durasi, dan biaya ekonomi dan kesehatan yang mendasarinya, aerta sangat tergantung pada langkah-langkah dari kapasitas sistem

kesehatan untuk mengatasi epidemi (dari pengujian, program isolasi bagi yang rentan, dan lain-lain), serta kapasitas sistem ekonomi dalam pengelolaannya melalui periode kegiatan ekonomi yang dapat ditanggguhkan tanpa harus mengorbankan struktur ekonominya.

Belajar dari Kebijakan *Lockdown* oleh China

China melakukan respon yang sangat cepat dengan melakukan penguncian wilayah atau kebijakan *lockdown*. Kebijakan *lockdown* tersebut pertama kali diterapkan pada tanggal 23 Januari 2020 di kota Wuhan, yaitu dengan menutup semua akses keluar masuk dari dan ke kota Wuhan, serta mengisolasi semua penduduk kota, mewajibkan setiap penduduk untuk tidak keluar rumah dan melarang bepergian, termasuk di beberapa kota lain di propinsi Hubei. Kebijakan ini dilakukan untuk memutus mata rantai meluasnya penyebaran virus *corona* atau *COVID-19*. Kekhawatiran akan meluasnya virus ini ke kota lain di China, membuat pemerintah kembali mengambil kebijakan cepat dengan melakukan penguncian atau *lockdown* total terhadap Propinsi Hunan, yaitu menutup semua jalur penerbangan dalam dan luar negeri secara nasional. Pemerintah China juga *shutdown* area publik seperti sekolah, universitas, dan tempat-tempat wisata, meniadakan semua kegiatan yang bersifat keramaian, serta menerapkan pembatasan perjalanan. *Lockdown* yang diterapkan pemerintah China terlihat sangat terstruktur, sistematis, dan tetap mengedepankan sisi humanis. Hal ini mencerminkan bahwa China memiliki sistem mitigasi bencana yang baik dan dapat dieksekusi dengan cepat. (Detiknews, 2020)

Berdasarkan laporan The Straits Times, tindakan cepat dan sistematis yang dilakukan Pemerintah China membuahkan hasil, dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan telah berhasil dengan kebijakan *lockdown* mereka. Tanggal 25 maret 2020, melalui Komisi Kesehatan China di Provinsi Hubei, pemerintah china mulai membuka *lockdown*,

dan khusus untuk kota Wuhan *lockdown* baru akan berakhir pada 8 April 2020. Kebijakan ini diambil setelah jumlah infeksi baru di Hubei sudah tidak ada lagi sejak 19 maret 2020. Secara keseluruhan, ada 67.000 kasus di Hubei dan 60.000 berhasil sembuh. Pemerintahan Xi Jinping optimistis mereka sudah menjinakkan penyebaran *COVID-19* di China. (Liputan6, 2020)

Pemerintah China dengan jumlah penduduk sekitar 1 milyar, sudah membuktikan keberhasilan mereka dengan kebijakan "*lockdown*"-nya dan secara perlahan-lahan mulai bangkit memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negaranya. Bahkan kebijakan *lockdown*.

Beberapa yang dapat dipelajari dari kebijakan pemerintah China, sebagai berikut (Huang et.all, 2020):

1. Waktu sangat penting. Kebijakan tingkat pertama adalah menghentikan wabah dan mencegah penyebarannya ke seluruh wilayah menggunakan setiap dan semua tindakan kesehatan masyarakat darurat. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan isolasi untuk memastikan jarak sosial dan menggunakan karantina yang ketat.
2. Transparansi informasi diperlukan. Pemerintah Wuhan kehilangan tiga minggu berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk mencegah berjangkitnya penyakit karena kesalahan krisis kesehatan masyarakat dan sistem pelaporan informasi. Memanfaatkan teknologi digital, *big data*, dan teknologi *cloud computing* bisa sangat membantu dalam menyediakan informasi *real-time* dan tepat untuk mengatasi kesalahan informasi, kurangnya komunikasi dan penundaan pelaporan atau pelaporan yang salah.
3. Kebijakan makro sangat mendasar untuk dilakukan. Untuk mencegah potensi krisis ekonomi setelah krisis kesehatan publik ini, pemerintah Cina tidak hanya memberikan dukungan fiskal, tetapi juga menciptakan kebijakan moneter dan keuangan untuk

mencegah resesi ekonomi makro akibat permintaan yang tak terduga dan guncangan pasokan. Tabungan dari usaha kecil menengah merupakan langkah yang sangat strategis dalam mendorong permintaan domestik, jaringan produksi, dan rantai nilai global.

Belajar dari Kebijakan Tidak *Lockdown* oleh Korea Selatan

Berbeda dengan China, Korea Selatan tidak melakukan *lockdown*. Sebagai salah satu negara dengan kasus positif *COVID-19* yang juga tertinggi, kini telah mengalami penurunan orang yang terkena dampak. Tercatat jumlah kasus *COVID-19* di Korea Selatan mencapai 8.086 dengan angka kematian 75 orang, dan angka kesembuhan yang cukup tinggi yakni 1.137 orang per 15 Maret 2020. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC), negaranya terus mengalami penurunan kasus. Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan, menyatakan telah melakukan *system respons* yang memadukan partisipasi publik sukarela dengan aplikasi kreatif teknologi canggih. Partisipasi publik harus disertai melalui keterbukaan dan transparansi informasi. (Liputan6, 2020a)

Dalam mendalami keberhasilan Korea Selatan mengatasi sebaran virus *COVID-19*, terdapat tiga kunci mengapa Korea Selatan mengambil keputusan yang tepat dalam penanganan *COVID-19*. Beberapa yang dapat dipelajari dari kebijakan pemerintah Korea Selatan, sebagai berikut (Kompas, 2020):

- a) Pemerintah mengadakan pengujian yang luas dan efektif dengan menggunakan *drive-thru-clinics*. Dalam satu hari 15 ribu warganya dapat dites virus sehingga meminimalisir penularan, baik masih berupa gejala ringan apalagi gejala berat.
- b) Pemerintah selalu memberi informasi yang terbuka kepada publik, sehingga warga lain yang belum tertular bisa menjauhi area tersebut.

- c) Korea Selatan yang memiliki populasi 51 juta orang, melakukan *social distancing* untuk memotong pertumbuhan kasus. Mereka juga menutup sekolah-sekolah, kantor-kantor dan melarang pertemuan-pertemuan besar.

Khusus untuk tes '*drive-through*', tindakan ini merupakan yang pertama di dunia. Hal ini bertujuan melindungi dokter dari penyakit yang sangat menular serta mempercepat pengujian. Ketika seseorang dengan gejala tiba di pusat pengujian, tim medis mengumpulkan sampelnya saat orang tersebut masih di dalam mobil. Langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan tim medis, menyelesaikan prosedur administrasi, dan mengajukan permohonan perawatan. Semua ini tanpa harus keluar dari mobil. Pengidentifikasi dan isolasi langsung bagi yang terkena kasus memiliki dampak bagus pada penambahan jumlah kasus baru. Dari puncaknya 900 orang yang terinfeksi per hari, jumlahnya turun menjadi sekitar 100 kasus (per 13 Maret 2020). Selanjutnya, jumlah kematian yang tercatat pada 13 Maret 2020 adalah 67 orang. Angka ini sangat rendah dibandingkan dengan negara lain.(Cheong,2020)

Pemilihan Strategi untuk Indonesia

Alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia adalah :

1. Jika dilakukan kebijakan pembatasan kuat, maka kesehatan masyarakat dapat dikendalikan, tetapi ekonomi akan menjadi korban di awal periode pandemi. Ketika kesehatan sudah dapat dikendalikan, ekonomi secara cepat dapat dikembalikan ke posisi semula atau ke ekuilibrium baru.
2. Jika dilakukan kebijakan pembatasan lemah, maka kesehatan masyarakat akan tidak terkendali, walaupun ekonomi dipaksakan tetap berjalan. Namun di kemudian hari karena penularan yang cepat tidak terkendali, ujung-ujungnya harus dilakukan pembatasan kuat yang justru

menghancurkan ekonomi pada akhirnya.

Namun kebijakan paling optimal dipilih yang paling cocok oleh Indonesia, adalah dengan melakukan pembatasan yang dilakukan secara bertahap, tidak langsung kuat, sambil memperbaiki dan mempersiapkan penambahan sarana kesehatan, seperti penambahan sarana rumah sakit, obat-obatan, alat pelindung diri (APD), paramedis, pemeriksaan kesehatan dan lain-lain, serta sosialisasi *physical distancing*, kebiasaan cuci tangan dan penggunaan masker, *work from home*, *school from home*, dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan China dan Korea Selatan.

Akibat pembatasan kegiatan masyarakat ini, tentunya tetap akan mengorbankan perekonomian, namun pemerintah harus sekuat tenaga untuk menahannya tidak jatuh terlalu dalam. Diantaranya adalah dengan memberikan stimulus dan bantuan kepada yang terdampak ekonomi paling parah, tidak boleh dikurangi dan salah sasaran.

Pemerintah harus menjaga lampu tetap menyala, walaupun terjadi pengorbanan terhadap perekonomian, namun strukturnya harus tetap dipertahankan jangan sampai rusak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan situasi dengan adanya penyebaran *COVID-19* memunculkan perdebatan terhadap kebijakan dikotomi antara *lockdown* atau tidak *lockdown* yang harus diputuskan oleh pemimpin yang memiliki otoritas penuh. Sangatlah menyesatkan jika keputusan ini tidak diperhitungkan dan direncanakan secara hati-hati. Kebijakan *lockdown* ini merupakan kebijakan “antara” dalam mencegah virus *COVID-19* lebih meluas penyebarannya.

Kegiatan-kegiatan yang ditutup atau ditanggguhkan selama *lockdown* harus mempertimbangkan kecepatan penyebaran *COVID-19*, dimana semua kebijakan harus memberikan manfaat kesehatan yang lebih tinggi walaupun memberikan pengorbanan biaya ekonomi yang tinggi.

Tingkat optimal *lockdown* akan menurun dari waktu ke waktu, tetapi tidak akan turun sampai ke titik nol dengan cepat. Karena itu pengurangan *lockdown* harus dilakukan secara bertahap. Tingkat *lockdown*, durasi, biaya ekonomi dan manfaat kesehatan yang mendasarinya, sangat tergantung dari kapasitas sistem kesehatan dalam mengatasi epidemi, serta kapasitas sistem ekonomi yang dimiliki suatu negara. Untuk Indonesia, kebijakan terbaik adalah dengan melakukan pembatasan yang dilakukan secara bertahap, tidak langsung kuat, sambil memperbaiki dan mempersiapkan penambahan sarana kesehatan, serta sosialisasi *physical distancing* dan kebiasaan perilaku sehat oleh masyarakat.

Pemerintah harus sekuat tenaga untuk menahan perekonomian tidak jatuh terlalu dalam dan harus menjaga lampu tetap menyala. Walaupun terjadi pengorbanan terhadap perekonomian, namun strukturnya harus tetap dipertahankan jangan sampai rusak.

Studi ini masihlah merupakan penelitian kualitatif dan perlu dikembangkan melalui penelitian kuantitatif, seperti yang dilakukan oleh Atkeson (2020) atau Eichenbaum et al. (2020). Namun kesimpulan kualitatif ini dapat berguna sebagai pedoman awal untuk model masa depan dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Piter. (2020). Ini Dampaknya Kalau RI Lockdown, Harianhaluan. Retrieved from <https://www.harianhaluan.com/news/detail/89736/ngeri-ini-dampaknya-kalau-ri-lockdown>

Alvin, Mikhael, Kahfi, Hamonangan, & Rustijono. (2020). Simulasi Covid-19 ILUNI Matematika UI. Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2020/04/01/65/2192356/jangan-anggap-remeh-physical-distancing-begini-jadinya-jika-tak-dipatuhi>

Arifin, Muhammad. (2017). Strategi Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan Disiplin di Perguruan Tinggi. *Jurnal EduTech*, 3 (1), ISSN: 2442-6024

Atkeson, A. (2020). *What will be the economic impact of COVID-19 in the US? Rough estimates of disease scenarios*. Mimeo.

Baldwin, R. (2020). *The supply side matters: Guns versus butter, COVID-style*, VoxEU.org, 22 March.

Baldwin, R. and B Weder di Mauro (eds) (2020). *Economics in the Time of COVID-19*, a VoxEU.org eBook, CEPR Press.

BNPB. (2020). Edukasi Virus Corona19. Retrieved from <https://bnpb.go.id/berita/edukasi-virus-corona19-badan-nasional-penanggulangan-bencana>

Cheong, Inkyo. (2020). The experience of South Korea with COVID-19, dalam *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*, A VoxEU.org Book CEPR Press.

David, Fred R. (2004). *Strategic Management*, Prentice Hall International, Inc.

Edhie, Muhammad. (2020). Sederet Persiapan yang Harus Dilakukan jika RI Mau Lockdown. Detikfinance. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4945485/sederet-persiapan-yang-harus-dilakukan-jika-ri-mau-lockdown>

Eichenbaum, M, S Rebelo and M Trabandt. (2020). "The macroeconomics of epidemics." Mimeo.

Gugus Tugas PP Covid-19. (2020). Retrieved from: <https://www.covid19.go.id/>

Hall, R and C Jones. (2007). The Value of Life and the Rise in Health Spending, *Quarterly Journal of Economics* 122(1): 39-72.

Huang, Lin, Wang & Xu. (2020). Saving China from the coronavirus and

- economic meltdown: Experiences and lessons, dalam *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*, A VoxEU.org Book CEPR Press.
- Jauch, Lawrence R. & Glueck, William F. (1988). *Business Policy and Strategic Management*, New York, McGraw-Hill.
- Kamdani, Shinta W. (2020). Kadin Hitung Dampak Lockdown. Ekonomibisnis. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200318/257/1214716/kadin-hitung-dampak-lockdown>
- Kemendes. (2020). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Retrieved from <http://covid19.kemkes.go.id>
- Kevin, & Dipasupil. (2020). Covid-19 Crisis Management and Prevention Plan. 2020. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/340443368_COVID-19_Crisis_Management_and_Prevention_Plan
- Kompas.com. (2020). Kunci Korea Selatan Berhasil Tangani Virus Corona Lebih Baik. Retrieved from <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/16/102319770/3-kunci-korea-selatan-berhasil-tangani-virus-corona-lebih-baik-dari?page=all>
- Kompas.com. (2020a). Update Virus Corona di Dunia 14 April 2020. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/04/14/071400865/update-virus-corona-di-dunia-14-april--1-9-juta-terinfeksi-443.732-semuh>
- Liputan6. (2020). China Akhiri Lockdown karena Corona Covid-19 Mulai Rabu 25 Maret. Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read/4210260/china-akhiri-lockdown-karena-corona-covid-19-mulai-rabu-25-maret>.
- Liputan6. (2020a). Cara Korea Selatan Turunkan Kasus Virus Corona COVID-19 Tanpa Lockdown. Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read/4202284/cara-korea-selatan-turunkan-kasus-virus-corona-covid-19-tanpa-lockdown>.
- Newsdetik. (2020). Cerita dan Pelajaran dari Lockdown Wuhan. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d-4953943/cerita-dan-pelajaran-dari-lockdown-wuhan>
- Ornelas, Emanuel. (2020). Managing economic lockdowns in an epidemic, VOX, CEPR Policy Portal. Retrieved from <https://voxeu.org/article/managing-economic-lockdowns-epidemic>
- Porter, M.E. (2004). *Competitive Advantage*, New York: The Free Press
- PP 21/2020. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka pengangan corona virus disease 2019.
- Read J.M., Bridge J.R.E. (2020). "Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of epidemiological parameters and epidemic predictions", 4 Februari 2020. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/338815978_Novel_coronavirus_2019-nCoV_early_estimation_of_epidemiological_parameters_and_epidemic_predictions
- Tribunnews. (2020). Pemerintah Pilih Karantina Wilayah Bukan Lockdown Apa Perbedaannya. Retrieved from <https://m.tribunnews.com/nasional/2020/03/30/pemerintah-pilih-karantina-wilayah-bukan-lockdown-apa-perbedaannya?page=all>
- UU 6/2018. (2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- WHO (2020), Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report-80. Retrieved from <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

- ases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
- WHO (2020a). 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): Strategic Preparedness And Response Plan, Februari 2020. Retrieved from <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf>
- Wibowo. (2008). *Managing Change Pengantar Manajemen Perubahan*, Bandung:Alfabeta.
- Yudhistira, Bhima. (2020). Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4948204/sederet-dampak-mengerikan-jika-jakarta-lockdown>.